



LAPORAN KINERJA DIREKTORAT POA TW II 2023



**DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA
DIREKTORAT JENDERAL PSDKP
2023**

Kata Pengantar

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Triwulan II Tahun 2023 disusun dalam rangka memenuhi amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas pencapaian Kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2023.

LKj berfungsi sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif, alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada. Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada telah menerapkan metode Balanced Scorecard (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Melalui implementasi BSC, pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Kontrak Kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada pada Tahun 2023.

Pencapaian IKU Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2023 telah diupayakan melalui pelaksanaan program Pemantauan dan Operasi Armada dengan 4 (empat) output/kegiatan utama, yaitu : (1) Pengembangan Infrastruktur Pengawasan SDKP; (2) Operasional Pusat Pengendalian; (3) Penyediaan Logistik dan Pengawasan Kapal Pengawas; dan (4) Operasional Armada dan Perawatan. Sampai dengan Triwulan II 2023 kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada telah berhasil melakukan beberapa kinerja strategis yang menjadi perhatian publik dalam hal operasi kapal pengawas, pengembangan teknologi, perbaikan pelayanan publik dan pengembangan infrastruktur pengawasan.

Akhir kata, semoga LKj ini dapat bermanfaat untuk perbaikan birokrasi dan sebagai bentuk pertanggungjawaban serta akuntabilitas Direktorat Pemantuan dan Operasi Armada pada Triwulan II Tahun 2023. Keberadaan laporan ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban namun sebagai upaya perbaikan terus menerus di Direktorat Pemantuan dan Operasi Armada dengan melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja untuk triwulan berikutnya dan dimasa mendatang agar menjadi lebih baik.

Jakarta, 10 Juli 2023

Plh.Direktur Pemantuan dan Operasi Armada



Teguh Wibowo, S.T

Tim Penyusun

Penanggungjawab

Direktur Pemantauan dan Operasi Armada

Koordinator Pelaporan Direktorat POA

1. Teguh Wibowo, S.T
2. Ema Velayati, S.St.Pi
3. Husain, S.Kom

Kontributor Pelaporan Direktorat POA

1. Ikrom Bungsu, S.Pi
2. Widya Ayu Lestari, S.I.K
3. Ridwan Nurzeha, S.Si
4. Edwin Haryanto, S.tr.Pi
5. Bilmantasya Al Fattha, ST
6. Noval Reza Jaya, A.Md

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	4
Daftar Tabel	5
Daftar Gambar	6
Ringkasan Eksekutif	7
BAB I Pendahuluan	11
A. Latar Belakang	12
B. Maksud dan Tujuan	14
C. Tantang dan Isu Strategis	15
BAB II Perencanaan Kinerja	
A. Arah Kebijakan KKP 2020-2024	22
B. Maksud dan Tujuan	23
C. Tantang dan Isu Strategis	27
D. Alokasi Anggaran	30
BAB III Akuntabilitas Kinerja	31
A. Pengukuran Capaian Kinerja	32
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja	35
B.1. Sasaran Kegiatan 1	36
B.2. Sasaran Kegiatan 2	38
B.3. Sasaran Kegiatan 3	42
B.4. Sasaran Kegiatan 4	51
B.5. Sasaran Kegiatan 5	64
Akuntabilitas Keuangan	
A. Realisasi Anggaran	82
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya	83
BAB IV Penutup	
A. Kesimpulan	
B. Rekomendasi	

Daftar Tabel

Tabel 1. Target dan realisasi capaian kinerja Dit. POA TW II 2023	8
Tabel 2. Daftar anggaran masing rincian output lingkup Dit. POA	30
Tabel 3. Capaian Kinerja Direktorat POA Triwulan II 2023	32
Tabel 4. Target dan Realisasi IKU-1 Triwulan II 2023	37
Tabel 5. Target dan Realisasi IKU-2 Triwulan II 2023	38
Tabel 6. rincian per komponen IKU indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP	39
Tabel 7. Rincian analisis pelanggaran periode Januari sd Juni 2023	39
Tabel 8. Rincian analisis kawasan konservasi periode Januari sd Juni 2023	40
Tabel 9. Rincian capaian IKU 3 Direktorat POA Triwulan II 2023	42
Tabel 10. Rincian hasil operasi pesawat udara	44
Tabel 11. Rincian capaian IKU 4 Direktorat POA Triwulan II 2023	48
Tabel 12. Hasil Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Ditjen PSDKP sampai dengan triwulan II 2023	49
Tabel 13. Rincian capaian IKU 5 Direktorat POA Triwulan II 2023	52
Tabel 14. Target dan Realisasi IKU 6 Periode Triwulan II 2023	53
Tabel 15. Daftar kegiatan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas	54
Tabel 16. Target dan Realisasi IKU 7 Periode Triwulan II 2023	65
Tabel 17. Hasil survey kepuasan masyarakat	65
Tabel 18. Hasil capaian kinerja IKU 8 periode triwulan II 2023	66
Tabel 19. Hasil capaian kinerja IKU 8 periode triwulan II 2023	68
Tabel 20. Target dan Realisasi IKU-10 Periode Triwulan II 2023	70
Tabel 21. Target dan Realisasi IKU-11 Periode Triwulan II 2023	71
Tabel 22. Target dan realisasi IKU 12 periode Triwulan II 2023	72
Tabel 23. Target dan realisasi IKU 13 periode Triwulan II 2023	73
Tabel 24. Rekapitulasi Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Triwulan II 2023	73
Tabel 25. Target dan realisasi IKU 14 periode Triwulan II 2023	74
Tabel 26. Rincian target dan realisasi IKU-15 periode Triwulan II 2023	75
Tabel 27. Target dan realisasi IKU-16 periode Triwulan II 2023	77
Tabel 28. Target dan realisasi IKU 17 periode Triwulan II 2023	79
Tabel 29. Tabel Capaian Nilai IKU MP Ditjen PSDKP Triwulan II 2023	79
Tabel 30. Target dan realisasi IKU 18 periode Triwulan II 2023	80
Tabel 31. Target dan realisasi IKU-19 periode Triwulan II 2023	80
Tabel 32. Rekap Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA Triwulan II Tahun 2023	80

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat POA	19
Gambar 2. Komponen penilaian indeks kualitas supervisi Pokmaswas	36

Ringkasan Eksekutif

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada (POA) telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) periode triwulan II Tahun 2023. Laporan Kinerja tersebut merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Direktorat POA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Peta Strategis Direktorat POA tahun 2023 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) tahun 2020-2024.

Sejalan dengan upaya pencapaian Visi dan Misi dimaksud. Direktorat POA telah menetapkan 5 Sasaran Kegiatan dan 19 Indikator Kinerja (IK) dengan target pencapaian IKU/IK periode Triwulan II 2023 sebanyak 10 IKU/IK telah memenuhi target. Capaian kinerja Direktorat POA untuk Triwulan II 2023 mencapai 111,35% mengalami kenaikan sebesar 0,02% dari capaian triwulan tahun II 2022 sebesar 111,33%.

Dalam hal pelaksanaan anggaran, Direktorat POA telah melaksanakan 9 Rincian Output (RO) yang tertuang dalam RKA-K/L Satker Sekretariat Ditjen PSDKP tahun 2023. Pagu Direktorat POA sebesar Rp444.055.581.000 (empat ratus empat puluh empat miliar lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Realisasi anggaran Direktorat POA Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp 145,120,428,422 (seratus empat puluh lima miliar seratus dua puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) atau sebesar 32,68% dari Pagu anggaran. Realisasi anggaran tersebut lebih rendah dari periode Triwulan II 2022 (Rp 175,836,878,956), dipengaruhi adanya Save Automatic Adjustment, namun kinerja penyerapan anggaran tersebut tetap dimaksimalkan sebagai bentuk perbaikan tata Kelola pelaksanaan anggaran dengan percepatan pengadaan Barang dan Jasa serta pelaksanaan kegiatan lebih awal di Tahun 2023.

Dalam merealisasikan anggaran, Direktorat POA mengacu pada prinsip budget follow program secara efektif dan efisien. Artinya, setiap anggaran yang dikeluarkan harus mendukung pencapaian indikator kinerja lingkup Direktorat POA. Realisasi pencapaian indikator kinerja Direktorat POA periode triwulan II Tahun 2023, ditabulasikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Target dan realisasi capaian kinerja Dit. POA TW II 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
01 Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	01 Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas (%)	40%	61.58	155%
02 Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	02 Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP (indeks)	Indeks 40	Indeks 50	125%
03 Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	03 Indeks Kinerja operasi pesawat patroli (indeks)	Indeks 93	Indeks 96,50	104%
	04 Indeks Kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	Indeks 87.6	Indeks 93.47	107%
04 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	05 Persentase penyelesaian pembangunan sarana Pengawasan SDKP Kapal Pengawas Kelas II (%)	100	-	-
	06 Persentase penyelesaian perawatan sarana Pengawasan SDKP (%)	100%	100%	100%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
05 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	07 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Indeks)	Indeks 80	Indeks 89.67	112%
	08 Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA (%)	100	-	-
	09 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA (%)	100%	1005	104%
	10 Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)	Indeks 71	Indeks 80.94	114%
	11 Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA (%)	77	-	-
	12 Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Direktorat POA (Nilai)	Nilai 90	-	-
	13 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75%	100%	133%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
05 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	14 Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat POA (%)	99.4 %	-	-
	15 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	21	-	-
	16 Jumlah inovasi yang dihasilkan (inovasi)	1 Inovasi	-	-
	17 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA (%)	92%	100%	109%
	18 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat POA (%)	77,5	-	-
	19 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat POA (%)	77,5	-	-

Nilai Capaian Kinerja Direktorat POA

111.35%

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan bagian integral dari pembangunan sektor kelautan dan perikanan, sekaligus merupakan salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pengawasan SDKP bertujuan untuk menjamin pemanfaatan SDKP secara tertib dan bertanggungjawab, sehingga kelestarian dan keberlanjutan tetap terpelihara untuk kepentingan ekonomi nasional.

Direktorat POA berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan. Peran tersebut diimplementasikan dengan mengarahkan seluruh kegiatan prioritas Ditjen PSDKP dalam mendukung terwujudnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepatuhan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan, memiliki dampak yang sangat luas, antara lain: kelestarian sumber daya alam perikanan, meningkatnya pendapatan negara, memberikan rasa aman, memberikan kepastian hukum dan yang paling penting menciptakan ekosistem berusaha secara bertanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Direktorat POA yang handal, profesional, akuntabel, efektif dan efisien, diperlukan manajemen kinerja yang meliputi: aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara Negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Direktorat POA telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Direktorat POA yang menginformasikan capaian kinerja selama Triwulan II 2023.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat POA Triwulan II 2023 yaitu:

Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja Direktorat POA kepada seluruh stakeholder.

Kedua, laporan akuntabilitas merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Direktorat POA sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tantangan dan Isu-Isu Strategis Tahun 2023

C.1. Tantangan Pengawasan SDKP

Tantangan pengawasan dan penegakan hukum dibidang kelautan dan perikanan dilaut saat ini semakin kompleks dan beraneka ragam jenisnya serta datangnya tidak dapat diprediksi, berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor: A/RES/63/111 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2008, ada 5 (lima) ancaman keamanan di laut dan salah satunya yaitu kegiatan IUU fishing. Selama ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang terpapar dari kegiatan IUUF, dibuktikan dengan jumlah kapal IUUF yang ditangkap oleh kapal pengawas KKP selama kurun waktu tahun 2015-2020 yaitu sebanyak 707 kapal terdiri dari kapal kapal ikan berbendera asing maupun berbendera Indonesia. IUU fishing merupakan kegiatan yang tersembunyi, multidimensi serta sulit untuk diprediksi, kegiatan penangkapan ikan bersifat lintas negara sehingga sulit untuk mengidentifikasi aktor yang membiayai maupun pemiliknya.

Semakin kompleknya ancaman pelanggaran di laut dibidang kelautan dan perikanan tentunya memerlukan perubahan dalam pengawasan SDKP dengan mengandalkan teknologi informasi agar pengawasan lebih efektif dan efisien. Tuntutan penggunaan teknologi dalam pengawasan SDKP tidak bisa ditawar-tawar lagi, sudah sepatutnya kita menggunakan perkembangan teknologi komputasi digital, internet, cloud computing, artificial intelligent (AI), big data serta Internet of Thing (IoT).

Modernisasi armada pengawasan juga menjadi kebutuhan, saat ini armada kapal pengawas 60% sudah berumur diatas 10 tahun dengan daya jelajah yang terbatas dan kemampuan serta kehandalan dalam melakukan pengawasan di laut juga sangat terbatas sehingga perlu untuk melakukan peremajaan kapal pengawas yang baru dan lebih modern. Modernisasi juga diperlukan untuk prasarana pengawasan dengan tuntutan pengawasan SDKP di UPT Pengawasan yang semakin kompleks maka keberadaan prasarana pengawasan menjadi kunci keberhasilan.

Kementerian kelautan dan Perikanan mulai tahun 2022 telah menetapkan kebijakan penangkapan ikan terukur, Kebijakan penangkapan ikan terukur merupakan reformasi pengelolaan perikanan berbasis output control (kuota per kapal), dengan pembagian kuota untuk nelayan lokal, kuota bukan untuk tujuan komersial (diantaranya diklat, litbang, kesenangan dan wisata), serta kuota untuk industri, salah satu faktor kunci keberhasilan kebijakan tersebut memerlukan upaya pengawasan di laut (while fishing) untuk memastikan bahwa pelaku usaha kelautan dan perikanan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan.

Perkembangan harga BBM dunia terus mengalami kenaikan, kondisi ini mengakibatkan hari operasi kapal pengawas terkoreksi dan menjadi berkurang dari yang direncanakan sehingga dengan kemampuan frekuensi operasi kapal pengawas tersebut maka pengawasan dilaut perlu diintegrasikan dengan VMS atau dengan operasi udara.

Tantangan berikutnya yang tidak kalah penting yaitu lahirnya PP Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, kondisi tersebut menuntut instansi yang memiliki kapal pengawas dilaut untuk bersinergi baik ditingkat pengambil keputusan maupun ditingkat operasional lapangan.

C.2. Isu - Isu Strategis

Peran Pokmaswas

Situasi pandemi Covid-19 yang sedang melanda seluruh dunia nyatanya tidak mengurangi praktik illegal fishing. Hal ini terbukti dengan masih tertangkapnya kapal-kapal pelaku illegalfishing oleh Kapal Pengawas Perikanan. Tercatat sebanyak 9 Kapal ikan asing tertangkap oleh Kapal Pengawas dan sebanyak 63 kapal ikan Indonesia tertangkap oleh Kapal Pengawas sampai dengan bulan Juni 2023.

Eskalasi ketegangan di kawasan Laut Natuna Utara juga terus terjadi. Hal ini tentunya harus menjadi salah satu perhatian bagi pemerintah Indonesia untuk tetap waspada dan mengoptimalkan unsur armada pengawasan dalam rangka mengawasi perairan Indonesia dari berbagai potensi tindakan illegal fishing.

Penguatan Armada Pengawasan SDKP

Dengan melihat keseriusan Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan IllegalFishing, Pemerintah Jepang akan menghibahkan kapal pengawas. Berdasarkan penandatanganan Exchange of Notes (ENs) tanggal 14 Februari 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapatkan hibah dari Pemerintah Jepang berupa 2 unit Kapal Eks. Patroli Badan Perikanan Jepang yaitu “Hakurei Maru” dan “Shirahagi Maru”. Kedua kapal tersebut memiliki panjang 63meter yang selanjutnya akan dikelola oleh Direktorat Jenderal PSDKP sebagai kapal pengawas kelautan dan perikanan.

Sebelum kedua kapal diserahterimakan ke KKP di Jakarta, Pemerintah Jepang melakukan penyempurnaan dan perbaikan kapal di Jepang dengan alokasi anggaran JPY 2,2 Miliar. Saat ini kedua kapal tersebut sedang dalam proses perbaikan di Galangan kapal Jepang dan dijadwalkan pengiriman kapal dari Jepang untuk diserahkan di Jakarta pada Tahun 2023.

Sebanyak 2 unit Kapal tersebut nantinya akan digunakan untuk memperkuat armada pengawasan SDKP Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan kemitraan yang cukup strategis antara Pemerintah Indonesia dan Jepang. Kerjasama ini di bidang kelautan dan perikanan khususnya dalam pengelolaan SDKP secara berkelanjutan.

Sinergitas Operasi Pengawasan

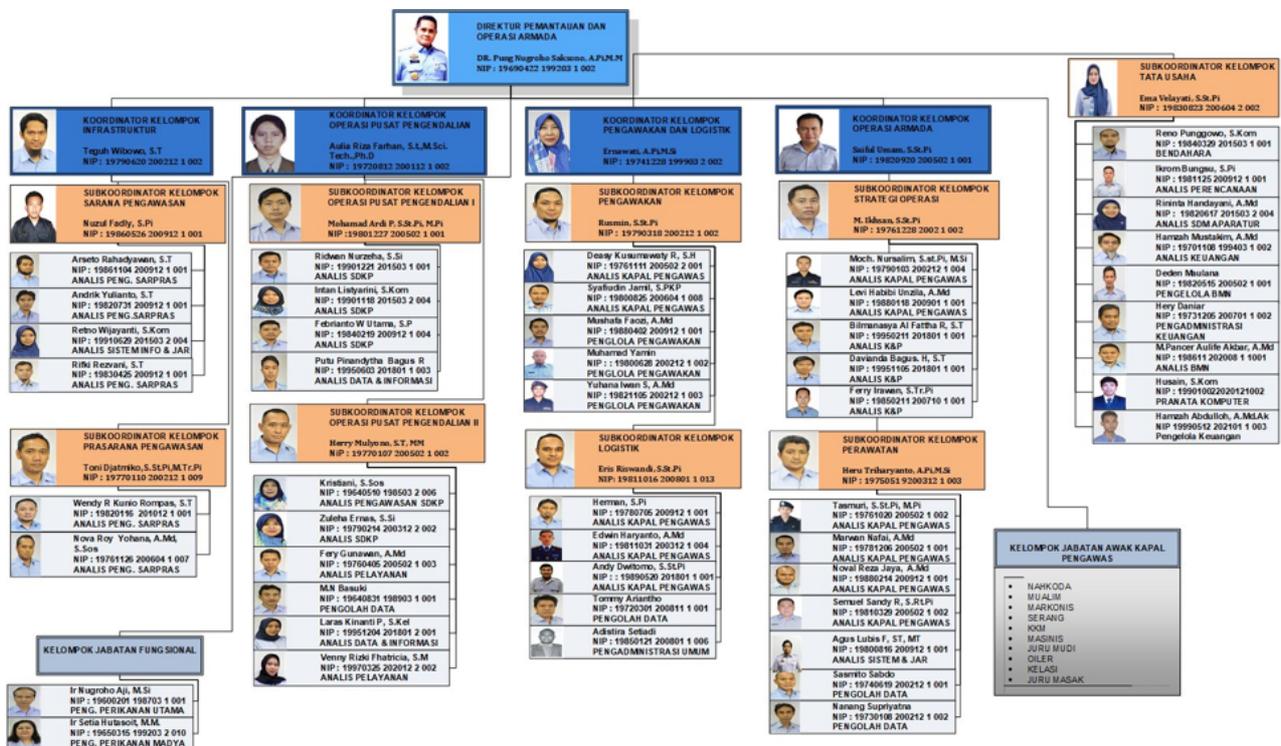
Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, Indonesia tentu memiliki beragam permasalahan seperti menghadapi berbagai kejahatan transnasional yang biasa terjadi di laut seperti: Illegal fishing, Penyelundupan barang, Penyelundupan narkoba, Trafficking/ Penyelundupan manusia dan boat people (manusia perahu), terorisme dan bajak laut.

Menjaga wilayah laut yang sangat luas tersebut, bukanlah pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu diperlukan sinergitas dari semua pihak, antara lain: TNI-Angkatan Laut, POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan-Ditjen Hubla, Kementerian Kelautan dan Perikanan-Ditjen PSDKP, Kementerian Keuangan-Dirjen Bea Cukai, Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115). Ke-tujuh lembaga penegak hukum tersebut melaksanakan patroli terkait dengan keamanan dilaut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing.

Tugas dan Fungsi Direktorat POA

Tugas Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan operasi armada.

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat POA



Fungsi Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawasan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
- penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawasan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;

d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;

e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Direktorat.

Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Direktorat POA secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Direktorat POA, Ditjen. PSDKP tahun 2023 serta sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan rencana strategis Ditjen. PSDKP untuk periode 2020-2024 dan perjanjian kinerja Direktorat POA tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan selama tahun 2023.

Bab IV Penutup

Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Direktorat POA, Ditjen. PSDKP periode Triwulan II 2023 dan merekomendasikan perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Arah Kebijakan KKP 2020-2024

1. **Memperbaiki komunikasi dengan nelayan**, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEE dan laut lepas, dan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, untuk peningkatan pendapatan nelayan.
2. **Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat** untuk penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat.
3. **Membangkitkan industri kelautan dan perikanan** melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah, untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan.
4. **Pengelolaan wilayah laut**, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
5. **Penguatan SDM dan inovasi riset** kelautan dan perikanan.

B. Arah Kebijakan Ditjen PSDKP 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024.

Sampai saat ini, rencana strategis Ditjen. PSDKP masih dalam proses sinkronisasi dengan kebijakan KKP. Adapaun proses penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periodea renstra 2020-2024. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan bottom up dan top down dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Koordinator dan Sub Koordinator lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan top down mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan bottom up dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

- Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
- Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
- Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);

- Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP

Bedasarkan arah kebijakan Pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan sasaran strategis pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:

- Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP
- Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP
- Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP
- Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP

2. Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dilakukan melalui:

- Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, speed boat dan sarana pengawasan lainnya)
- Membangun infrastruktur pengawasan yang memadai
- Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional
- Mengembangkan kelembagaan pengawasan

3. Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:

- Operasi bersama pengawasan di laut
- Pertukaran data
- Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan
- Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan

4. Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:

- Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat
- Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan IUU fishing
- Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (preventif), pembinaan, represif (ultimum remedium).
- Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan

5. Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dilakukan melalui:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab
- Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain
- Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS
- Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”
- Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”
- Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar

C. Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 6/PERMEN-KP/2017, Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada terdiri dari 4 (empat) keluaran, yaitu:

- Pengembangan Infrastruktur Pengawasan SDKP;
- Operasional Pusat Pengendalian;
- Penyediaan Logistik dan Pengawasan Kapal Pengawas; dan
- Operasional Armada dan Perawatan.

Dalam mendukung kegiatan pemantauan dan operasi armada didukung oleh beberapa rincian output kegiatan sebagai berikut:

1. Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional;
2. Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat;
3. Kapal Pengawas;
4. Operasi Pesawat Patroli;
5. Operasi Kapal Pengawas;
6. Operasional Pembinaan POKMASWAS yang Dipantau;
7. Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan SDKP yang Dipantau;
8. NSPK Pemantauan dan Operasi Armada;
9. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan;
10. Layanan Dukungan Manajerial Perkantoran.

D. Perjanjian Kinerja Dit. POA



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Pung Nugroho Saksono**

Jabatan : Direktur Pemantauan dan Operasi Armada

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Adin Nurawaluddin**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Direktur Pemantauan dan Operasi Armada



Pung Nugroho Saksono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas (%)	80
2	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat	2	Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP (indeks)	80
3	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	3	Indeks kinerja operasi pesawat patroli (indeks)	93
		4	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87,6
4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5	Persentase penyelesaian pembangunan sarana Pengawasan SDKP Kapal Pengawas Kelas II (%)	100
		6	Persentase penyelesaian perawatan sarana Pengawasan SDKP (%)	100
5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	7	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Indeks)	80
		8	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA (%)	100
		9	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA (%)	100
		10	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)	78
		11	Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA (%)	77
		12	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Direktorat POA (Nilai)	90
		13	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		14	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat POA (%)	99.4

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		15 Nilai implementasi program budaya Kerja (Nilai)	21
		16 Jumlah inovasi yang dihasilkan (inovasi)	1
		17 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA (%)	92%
		18 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat POA (%)	77,5%
		19 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat POA (%)	77,5%

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	494.674.299.000
Total Anggaran		494.674.299.000

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Direktur Pemantauan dan Operasi
Armada


Pung Nugroho Saksono

Dalam mendukung Sasaran Kegiatan tersebut, beberapa output kegiatan dan alokasi anggaran Direktorat POA triwulan II 2023 ditabulasikan sebagai berikut:

D. ALOKASI ANGGARAN 2023

Tabel 2. Daftar anggaran masing rincian output lingkup Dit. POA

RINCIAN OUTPUT	VOLUME RO	ANGGARAN
Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	5100 Produk	2,750,000,000
NSPK Pemantauan dan Operasi Armada	4 NSPK	225,000,000
Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan SDKP yang Dipantau	3 Laporan	500,000,000
Operasional Pembinaan POKMASWAS yang Dipantau	34 Laporan	140,000,000
Operasi Kapal Pengawas	90 Hari Operasi	189,658,206,000
Operasi Pesawat Patroli	150 Operasi	41,250,000,000
Kapal Pengawas	2 Unit	233,387,080,000
Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	12 Unit	31,273,330,000
Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	1 Unit	11,419,045,000
TOTAL		510,602,661,000

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Direktorat POA Triwulan II 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh nilai capaian kinerja Direktorat POA sebesar **111,35%** dengan capaian indikator NPSS berwarna **BIRU** dengan kategori **ISTIMEWA**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana disajikan pada tabel Capaian Kinerja Organisasi berikut:

Tabel 3. Capaian Kinerja Direktorat POA Triwulan II 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
01 Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	01 Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas (%)	40%	61.58	155%
02 Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	02 Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP (indeks)	Indeks 40	Indeks 50	125%
03 Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	03 Indeks Kinerja operasi pesawat patroli (indeks)	Indeks 93	Indeks 96,50	104%
	04 Indeks Kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	Indeks 87.6	Indeks 93.47	107%
04 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	05 Persentase penyelesaian pembangunan sarana Pengawasan SDKP Kapal Pengawas Kelas II (%)	100	-	-
	06 Persentase penyelesaian perawatan sarana Pengawasan SDKP (%)	100%	100%	100%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
05 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	07 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Indeks)	Indeks 80	Indeks 89.67	112%
	08 Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA (%)	100	-	-
	09 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA (%)	100%	1005	104%
	10 Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)	Indeks 71	Indeks 80.94	114%
	11 Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA (%)	77	-	-
	12 Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Direktorat POA (Nilai)	Nilai 90	-	-
	13 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75%	100%	133%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
05 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	14 Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat POA (%)	99.4 %	-	-
	15 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	21	-	-
	16 Jumlah inovasi yang dihasilkan (inovasi)	1 Inovasi	-	-
	17 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA (%)	92%	100%	109%
	18 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat POA (%)	77,5	-	-
	19 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat POA (%)	77,5	-	-

Nilai Capaian Kinerja Direktorat POA

111.35%

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

SASARAN KEGIATAN 1

TERSELENGGARANYA SISTEM PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKAT YANG PARTISIPATIF

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif” didukung oleh satu Indikator Kinerja Utama, yaitu: "Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas".

1-Indeks Kualitas Supervisi Pokmaswas

Sistem pengawasan berbasis masyarakat adalah pendekatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan ini mengandalkan peran serta masyarakat dalam memantau lingkungan mereka, mendeteksi potensi masalah atau ancaman, serta berkontribusi dalam penanganan situasi yang mungkin mengganggu keamanan dan ketertiban.

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kualitas pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi kepada Pokmaswas. Supervisi diperlukan

Supervisi oleh Satker Pusat untuk kegiatan pembinaan Pokmaswas oleh Pemda Provinsi perlu dilakukan karena beberapa alasan berikut:

- **Koordinasi dan Pengawasan,** Supervisi oleh Satker Pusat memungkinkan adanya koordinasi dan pengawasan yang efektif terhadap kegiatan pembinaan Pokmaswas oleh Pemda Provinsi. Dengan adanya supervisi, Satker Pusat dapat memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku.
- **Peningkatan Kualitas,** Supervisi dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pembinaan Pokmaswas. Satker Pusat dapat memberikan arahan, bimbingan, dan saran yang diperlukan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kegiatan pembinaan

- **Monitoring dan Evaluasi**, Melalui supervisi, Satker Pusat dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan Pokmaswas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tujuan dan indikator kinerja tercapai dengan baik.
- **Pengalaman dan Pengetahuan**, Satker Pusat memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam pembinaan Pokmaswas. Dengan melakukan supervisi, mereka dapat berbagi pengalaman terbaik dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada Pemda Provinsi dalam melaksanakan kegiatan pembinaan

Dengan melakukan supervisi oleh Satker Pusat, diharapkan bahwa kegiatan pembinaan Pokmaswas oleh Pemda Provinsi dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Indek kualitas supervisi pembinaan POKMASWAS dinilai terhadap kualitas kegiatan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dalam melakukan supervisi terhadap pembinaan POKMASWAS yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Hasil pembinaan tersebut wajib dikirimkan dalam bentuk laporan pembinaan POKMASWAS dengan merujuk pada Komponen kegiatan yang dinilai antara lain:

Gambar 2. Komponen penilaian indeks kualitas supervisi Pokmaswas



Tabel 4. Target dan Realisasi IKU-1 Triwulan II 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	RENSTRA		
				T	R	%
Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas	Indeks 40	Indeks 61,85	155	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian pada Triwulan II 2023 melampaui target yang ditetapkan yaitu tercapai sebesar Indeks 61,85 dari target Indeks 40 dengan persentase capaian sebesar 155%. Indikator kinerja ini belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru, hasil penyempurnaan Indikator Kinerja 2023 dimana dilakukan perubahan penjenjangan kinerja dari level 1. Demikian pula halnya dengan perbandingan dengan Renstra 2020-2024, IKU ini belum dapat dibandingkan karena memang belum disetujui masuk ke dalam revisi Renstra KKP.

Dengan capaian tersebut, dapat dimaknai sebagai sebuah indikasi bahwa target yang ditetapkan telah tercapai dengan maksimal.

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini antara lain:



Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 1 ini sebesar Rp140.000.000 dan hingga periode Triwulan II 2023 ini telah direalisasikan sebesar 62.541.000,- atau 44,67% dari total pagu.

SASARAN KEGIATAN 2

TERSELENGGARANYA SISTEM PEMANTAUAN SDKP YANG AKURAT

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Sistem Pemantauan SDKP yang akurat” didukung oleh satu Indikator Kinerja Utama, yaitu: "Indeks Pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP".

2-Indeks Pemenuhan Data dan Analisis Hasil Pemantauan untuk Operasi Pengawasan SDKP

Indikator Kinerja “Indeks Pemenuhan Data dan Analisis Hasil Pemantauan Untuk Operasi Pengawasan SDKP” bertujuan untuk mendukung operasi pengawasan SDKP merupakan pengukuran pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan yang disiapkan oleh Direktorat POA kepada user pengguna hasil analisis. Analisis yang diberikan bersumber dari data Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) dan Automatic Identification System (AIS).

Rincian capaian IKU 2 Direktorat POA periode Triwulan II 2023 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 5. Target dan Realisasi IKU-2 Triwulan II 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	TW II 2022			RENSTRA 2024		
				T	R	%	T	R	%
Indeks Pemenuhan Data dan Analisis Hasil Pemantauan Untuk Operasi Pengawasan SDKP	Indeks 40	Indeks 43,33	108,33	Indeks 40	Indeks 50	125	Indeks 80	Indeks 43,33	54,16%

Berdasarkan tabel di atas, target untuk IKU 2 dapat dicapai secara maksimal, bahkan melampaui target. Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada Tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar 6,77%. Kenaikan capaian ini dipengaruhi oleh terpenuhinya seluruh komponen yang merupakan upaya maksimal dari Direktorat POA khususnya kelompok Operasi Pusat Pengendalian (Pusdal) Pengawasan SDKP.

Bila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2020-2024 baru mencapai 54.16%, dimana pada masa akhir Renstra ditargetkan "Indeks 80" sementara capaian baru pada posisi "Indeks 43.33". Hal ini tentunya akan dilakukan percepatan pencapaian target pada tahun 2024.

Indikator ini dipengaruhi oleh 4 sub indikator yaitu: Indikasi Pelanggaran, Analisis Kapal di Kawasan Konservasi, Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup, dan Data untuk Operasi Kapal Pengawas/Airborne Surveillance

Tabel 6. rincian per komponen IKU indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP

No	Indikator	Bulan						Bobot	TW I
		1	2	3	4	5	6		
1	Indikasi Pelanggaran	1	1	1	1	1	1	40	20
2	Analisis Kapal di Kawasan Konservasi	1	1	1	1	1	1	20	10
3	Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup	1	1	1	1	1	1	20	10
4	Data untuk Ops Kapal Pengawas/Airborne Surveillance	1	1	1	1	1	1	20	10
Indeks									50

1.Indikasi Pelanggaran

Indikasi pelanggaran adalah sebuah analisis yang dilakukan terhadap kapal-kapal ikan yang terdaftar di dalam sistem pemantauan kapal perikanan berkaitan dengan berbagai indikasi pelanggaran pengelolaan sumber daya perikanan.

Jenis-jenis indikasi pelanggaran antara lain pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan (DPI), laut lepas, pelabuhan pangkal, Jalur Penangkapan, beroperasi di kawasan konservasi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilarang.

Hasil analisis tersebut lalu diterbitkan semacam laporan "Indikasi Pelanggaran" selama periode tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk diketahui, Selama periode Triwulan II 2023, Pusdal PSDKP telah menerbitkan analisis indikasi pelanggaran kapal perikanan **sebanyak 834** kapal dengan rincian sebagaimana pada Tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 7. Rincian analisis pelanggaran periode Januari sd Juni 2023

No	Indikasi Pelanggaran	Daerah Penangkapan Ikan (WPP)	Daerah Penangkapan Ikan (Laut Lepas)	Daerah Penangkapan Ikan (Luar Negeri)	Daerah Penangkapan Ikan (Jalur Penangkapan)	Pelabuhan Pangkal/ Muat	Beroperasi tanpa SIPI/SIKPI	Kawasan Konservasi
1	Januari	153	14	19	22	0	0	0
2	Februari	132	2	4	19	1	0	0
3	Maret	151	10	22	35	2	0	0
4	April	50	5	7	42	0	0	0
5	Mei	39	4	2	39	0	0	1
6	Juni	35	0	0	24	0	0	0
TOTAL		560	35	54	181	3	0	1

2. Analisis Kapal di Kawasan Konservasi

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU 31/2004, menjelaskan bahwa konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Dalam konteks konservasi sumber daya ikan, konservasi ekosistem merupakan upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang.

Sesuai dengan peraturan tersebut Kelompok Bidang Operasi Pusat Pengendalian pada periode triwulan II 2023 dilakukan pemantauan terhadap Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia dan terdapat 1.060 kawasan konservasi yang terpantau terdapat kapal yang melakukan indikasi kegiatan penangkapan dan/atau labuh di dalam kawasan konservasi. Rincian jumlah kapal yang beroperasi di Kawasan Konservasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 8. Rincian analisis kawasan konservasi periode Januari sd Juni 2023

No.	Kawasan Konservasi	Labuh/Dugaan Menangkap					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
1	KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BURUWAY, ARGUNI, TELUK ETNA, DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI PAPUA BARAT	8	3	4	6	4	6
2	KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN GILI SULAT, GILI LAWANG, DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1	1	1	0	1	1
3	KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN GILI TANGKONG, GILI NANGGU, GILI SUDAK, DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0	1	0	0	1	0
4	KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN GUGUSAN PULAU-PULAU MOMPARANG DAN PERAIRAN SEKITARNYA KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0	0	0	0	0	1
5	KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT KABUPATEN RAJA AMPAT DI PROVINSI PAPUA BARAT	9	6	10	12	8	3
6	KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN SAWO-LAHEWA DAN PERAIRAN SEKITARNYA KABUPATEN NIAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA	1	0	1	0	9	2

3. Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup, dinyatakan bahwa setiap kapal pengangkut ikan hidup berbendera asing diizinkan masuk ke wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia paling banyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sampai dengan bulan Juni 2023 Direktorat POA telah melakukan pemantauan terhadap **213 kapal** pengangkut ikan hidup.

4. Data untuk Ops Kapal Pengawas/Airborne Surveillance

Penyiapan data kapal perikanan berdasarkan sistem pemantauan kapal perikanan (SPKP) dan Automatic Identification System (AIS) dilaksanakan dalam rangka mendukung operasi kapal pengawas dan pelaksanaan airborne surveillance. Pada Triwulan II 2023 telah dilaksanakan penerbitan data untuk operasi kapal pengawas yang dilakukan setiap bulan.

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 2 ini sebesar Rp5.419.045.000, dan sampai dengan Triwulan II 2023 telah terealisasi sebesar Rp1.613.407.355,- atau **29.77%** dari total pagu.

SASARAN KEGIATAN 3

TERSELENGGARANYA OPERASI ARMADA PENGAWASAN SDKP YANG EFEKTIF

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif” diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli (indeks), (2) Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (indeks).

3-Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli

Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Pesawat Patroli agar terwujudnya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif. Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
3. Persentase Capaian Hari Operasi;
4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;
5. Persentase Jumlah Kapal yang di Validasi;
6. Persentase Operasi di Wilayah WPPNRI yang Rawan dan IUUF yang tinggi KIA (WPPNRI 571, 711, 716, 717);
7. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap pemantauan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau kecil, dan Kawasan Konservasi;
8. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap Patroli Terkoordinasi Regional, Nasional dan Internasional;
9. Jumlah Dukungan kegiatan lainnya (Misi SAR, Kemanusiaan, Dukungan Pimpinan & MKP).

Tabel 9. Rincian capaian IKU 3 Direktorat POA Triwulan II 2023

INDIKATOR KINERJA	TW II 2022			TW II 2023			RENSTRA 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks Kinerja Pesawat Patroli	Indeks 92	Indeks 99.12	107.74	Indeks 93	Indeks 96.50	104	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian pada Triwulan II 2023 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 96,50 dengan persentase capaian sebesar 104%. Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada Tahun 2022, mengalami penurunan sebesar 2,62% dikarenakan pada periode Triwulan II 2022 telah mencapai hari operasi lebih banyak sebesar 98 hari operasi dibandingkan Triwulan II 2023 sebanyak 80 hari operasi. Hal tersebut dikarenakan pada tahun ini kegiatan operasi pesawat patroli akan didistribusikan lebih merata untuk mengcover hari operasi sepanjang tahun. Capaian ini mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan telah tercapai dengan maksimal. Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya pembinaan yang dilakukan selama periode bulanan secara langsung oleh Direktur Pemantauan dan Operasi Armada. Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target akhir Renstra 2024.

Selama periode operasi Triwulan II 2023 telah dilaksanakan sebanyak 13 (tiga belas) periode operasi. Dari pelaksanaan operasi tersebut diperoleh sebanyak 80 hari operasi. Pesawat yang digunakan antara lain: "MPA ATR 42-300 PK-YRE" dan "Hawker 900XP".

Operasi dilaksanakan secara terintegrasi dengan armada kapal pengawas dilaut antara lain:

1. Periode I: Operasi Mandiri.
2. Periode I-A: KP. Orca 03, KP dan Hiu Macan Tutul 02
3. Periode II: Operasi Mandiri.
4. Periode II-A: KP. Orca 03, KP. HMT 02, KP. Paus 01, KP. Orca 04, KP. Hiu 02 dan KP. Hiu 05.
5. Periode III-A: KP. Orca 03, KP. HMT 02 dan KP. HIU 15.
6. Periode III-B&C: Operasi Mandiri.
7. Periode III-D: Operasi Mandiri.
8. Periode IV: Operasi Mandiri.
9. Periode IV-A: Operasi Mandiri.
10. Periode V: KP. Orca 01, KN. Pulau Nipah Cape Sorel Vessel
11. Periode V-A: Operasi Mandiri.
12. Periode V-B: Operasi Mandiri.
13. Periode VI: KP. Hiu Macan Tutul 02.

Adapun hasil operasi terintegrasi antara unsur pesawat patroli udara dengan kapal pengawas perikanan ditabulasikan sebagai berikut:

Adapun hasil operasi terintegrasi antara unsur pesawat patroli udara dengan kapal pengawas perikanan ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 10. Rincian hasil operasi pesawat udara

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
I	9 - 10 Januari 2022	2	712	1934.4	Operasi Mandiri	Telah dilaksanakan kegiatan operasi patroli di wilayah WPPNRI 712 laut jawa dengan hasil pemantauan ditemukan 1 (satu) unit kapal perikanan penampung dengan status transmitter pada saat pemantauan aktif.
IA	13 - 24 Januari 2022	11	711, 571, 572, 713, 712	111371.2	KP. ORCA 03 KP. HIU MACAN TUTUL 02	<ul style="list-style-type: none"> Validasi kepatuhan terhadap 7 unit Kapal Purse Seine, 2 unit Kapal Castnet dan 2 unit Kapal Gillnet dengan status transmitter pada saat pemantauan aktif Pemantauan terhadap Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Kepulauan Anambas, Gili Trawangan, dan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kepulauan Mentawai
II	7-8 & 23-24 Februari 2023	4	712, 713	-	Operasi Mandiri	Telah dilaksanakan dukungan kegiatan Pimpinan dengan lancar aman dan terkendali
II-A	14 - 26 Februari 2023	10	711, 571, 572, 712, 713, 714	136630.4	KP. ORCA 03 KP. HIU MACAN TUTUL 02 KP. PAUS 01 KP. ORCA 04 KP. HIU 02 KP. HIU 05	<ul style="list-style-type: none"> Pada tanggal 15 Februari 2023, pesawat udara Air Surveillance dibayangi oleh US Navy F-18 Hornet selama 20 menit di dalam Landas Kontinen Indonesia. Tindak lanjut dari kejadian ini telah dilaporkan kepada pimpinan untuk kemudian ditindaklanjuti; Peninjauan kembali Kapal Bitumen Tanker Pengangkut Aspal (MV. AASHI) yang kandas di Perairan Nias oleh Direktur Jenderal PSDKP bersama dengan Tim Polsus PPSDK pada tanggal 25 Februari 2023. Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya. Pendataan data sebaran kapal perikanan di WPPNRI 711, 571, 572, 712, 713, dan 714

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
III	5, 8-9 Maret 2023	3	712	-	Operasi Mandiri	Telah dilaksanakan dukungan kegiatan Pimpinan dengan lancar aman dan terkendali
III-A	7 - 18 Maret 2023	10	43,84	111.731,2	KP. ORCA 03, KP. HIU MACAN TUTUL 02, KP. HIU 15	<ul style="list-style-type: none"> Validasi Kepatuhan SPKP Kapal Perikanan di beberapa WPPNRI Penyampaian posisi Kapal Ikan Asing (KIA) ke Kapal Pengawas Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya. Pendataan data sebaran kapal perikanan di WPPNRI 711, 716, 713, dan 712
III-B&C	12 - 14 Maret 2023	2	8,7	-	Operasi Mandiri	Telah dilaksanakan dukungan kegiatan Pimpinan dengan lancar aman dan terkendali
III-D	20 - 22 Maret 2023	3	11,69	-	Operasi Mandiri	Telah dilaksanakan dukungan kegiatan Pimpinan dengan lancar aman dan terkendali
IV	24 Maret -12 April 2023	6	23,17	57.132,8	Operasi Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> Validasi Kepatuhan SPKP Kapal Perikanan di beberapa WPPNRI Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya. Pendataan data sebaran kapal perikanan di WPPNRI 712, 713, 714

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
IV-A	13 - 22 April 2023	9	712, 718, 715, 714	77.262.4	Operasi Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> Validasi Kepatuhan SPKP Kapal Perikanan di beberapa WPPNRI Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya. Pendataan data sebaran kapal perikanan di WPPNRI 712, 718, 715, 714
V	29 - 30 April 2023 10 - 11 April 2023 16 - 20 April 2023	8	715, 711, 573, 714, 718	63396.8	KP. ORCA 01 KN. PULAU NIPAH CAPE SOREL VESSEL	<ul style="list-style-type: none"> Validasi kepatuhan terhadap SPKP terhadap 7 Unit KII, masing-masing 3unit Kapal Castnet, dan 4unit Kapal Purse Seine dengan status transmitter aktif pada saat pemantauan; Telah dilakukan dukungan operasi GANNET - 7 AUSINDO; Telah dilakukan Pemantauan terhadap Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Laut Sawu; Telah dilaksanakan dukungan kegiatan Pimpinan dengan lancar aman dan terkendali; Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya; Pendataan data sebaran kapal perikanan di WPPNRI 711, 573, 713, 714, dan 718.
V-A	8 - 9 Mei 2023	1	712	-	Operasi Mandiri	Telah dilaksanakan dukungan kegiatan Pimpinan dengan lancar aman dan terkendali
V-B	21 - 23 April 2023	3	573, 714, 718	28347.2	Operasi Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> Pendataan data sebaran kapal perikanan di WPPNRI 573, 714, 718 Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya.

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
VI	5 - 14 Juni 2023	8	711, 713, 715, 716, 718	91779.2	KP. HIU MACAN TUTUL 02	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan uji petik/ validasi kepatuhan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) terhadap 8 unit KII Berdasarkan data hasil pemantauan telah dilakukan plotting bahwa Kapal Perikanan Asing asal Filipina masih berada diluar Batas ZEE Indonesia. Pemantauan Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan TWP Laut Banda tidak ditemukan adanya pelanggaran bidang kelautan dan perikanan. Telah dilaksanakan dukungan kegiatan Pimpinan dengan lancar aman dan terkendali Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya. Pendataan data sebaran kapal perikanan di WPPNRI 711, 713, 716, 715 dan 718.
TOTAL HARI OPERASI		80	Total Coverage Area (NM2)	679.585,6		

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Responsif terhadap realisasi penggunaan pesawat udara harian sehingga dapat menyesuaikan volume harian penggunaan jam operasi.
2. Pergerakan pesawat udara dilaksanakan pada wilayah-wilayah prioritas dengan indikasi kerawanan sedang dan tinggi serta menambah target operasi pengawasan kelautan yang berada pada wilayah-wilayah yang beririsan dengan pengawasan perikanan sehingga meningkatkan capaian operasi;
3. Mengurangi volume ferry flight secara signifikan.

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 3 ini sebesar Rp41.250.000.000,- dan sampai dengan Triwulan II 2023 telah terealisasi sebesar Rp22.703.177.032,- atau 55,04% dari total pagu.

4-Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasi Kapal Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan sebanyak 9 variabel, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
3. Persentase Capaian Hari Operasi;
4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;
5. Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku IUU Fishing;
6. Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang;
7. Jumlah Pemutusan Rumpon Ilegal;
8. Dukungan Kegiatan Kapal Pengawas terhadap Kegiatan Nasional, Regional, dan Internasional;
9. Dukungan Kegiatan Sosial dan Penyelamatan.

Tabel 11. Rincian capaian IKU 4 Direktorat POA Triwulan II 2023

INDIKATOR KINERJA	TW II 2022			TW II 2023			RENSTRA 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks Kinerja Kapal Pengawas	Indeks 87.5	Indeks 88.7	102	Indeks 87.6	Indeks 93.47	107	89	93.47	105

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian pada Triwulan II 2023 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 93,47 dengan persentase capaian sebesar 107%. Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada Tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar 4,6% dari yang sebelumnya sebesar 88,87%. Kenaikan capaian ini dipengaruhi oleh banyaknya Kapal Pengawas yang mencapai komponen target utama kapal perikanan diperiksa, yakni sebanyak 17 Kapal Pengawas pada tahun 2023 dibandingkan 10 Kapal Pengawas pada tahun 2022. Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya pembinaan yang dilakukan periode bulanan secara langsung oleh Direktur Pemantauan dan Operasi Armada. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024 yaitu sebesar 89 persen, realisasi telah mencapai 93,47 persen melebihi dari target yang ditentukan.

Selama periode Triwulan II 2023 untuk mendukung capaian IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas telah melaksanakan Operasi Mandiri Kapal Pengawas dengan jumlah hari operasi mandiri 32 Kapal Pengawas sebanyak 1.304 hari operasi dengan rata-rata hari operasi setiap kapal pengawas sebanyak 40 hari operasi.

Tabel 12. Hasil Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Ditjen PSDKP sampai dengan triwulan II 2023

NO	NAMA KAPAL PENGAWAS	HARI OPS	JAM LAYAR	DIPERIKSA			DITANGKAP		
				KII	KIA	JML	KII	KIA	JML
1	KP. ORCA 01	65	869.52	65	5	70	4	5	9
2	KP. ORCA 02	32	404.63	124	0	124	0	0	0
3	KP. ORCA 03	48	783.83	164	1	165	0	1	1
4	KP. ORCA 04	43	368	41	0	41	2	0	2
5	KP. ORCA 05 (HAKUREI MARU)	0	0	0	0	0	0	0	0
6	KP. ORCA 06 (SHIRAHAGI MARU)	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KP. HIU MACAN TUTUL 01	27	244	59	0	59	2	0	2
8	KP. HIU MACAN TUTUL 02	47	718.55	114	0	114	1	0	1
9	KP. PAUS 01	35	514.33	115	0	115	4	0	4
10	KP. AKAR BAHAR 01	36	267.52	0	0	0	0	0	0
11	KP. HIU MACAN 01	40	485.16	84	0	84	0	0	0
12	KP. HIU MACAN 03	50	483.61	96	0	96	1	0	1
13	KP. HIU MACAN 04	36	457.36	60	0	60	4	0	4
14	KP. HIU MACAN 05	34	308.32	64	0	64	6	0	6
15	KP. HIU MACAN 06	46	671	53	0	53	0	0	0
16	KP. HIU 01	40	429.91	104	0	104	0	0	0
17	KP. HIU 02	60	674.35	117	0	117	9	0	9
18	KP. HIU 03	46	523.97	135	0	135	3	0	3
19	KP. HIU 04	52	560.41	119	0	119	0	0	0
20	KP. HIU 05	60	527	149	0	149	12	0	12
21	KP. HIU 06	30	311.83	85	0	85	1	0	1
22	KP. HIU 07	41	457	80	0	80	3	0	3
23	KP. HIU 08	62	674.32	114	10	124	0	2	2
24	KP. HIU 09	25	342.73	83	0	83	3	0	3
25	KP. HIU 10	50	1674.77	95	0	95	0	0	0
26	KP. HIU 11	50	558.56	100	0	100	0	0	0
27	KP. HIU 12	50	498.7	103	0	103	2	0	2
28	KP. HIU 13	35	373.28	45	0	45	2	0	2
29	KP. HIU 14	38	421.5	66	0	66	0	0	0
30	KP. HIU 15	40	417.61	85	0	85	2	0	2
31	KP. HIU 16	60	653.74	126	1	127	2	1	3
32	KP. HIU 17	26	229.91	56	0	56	0	0	0
JUMLAH TOTAL		1304	15905,42	2701	17	2718	63	9	72

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Penggunaan RPM secara proporsional untuk mengendalikan penggunaan BBM sehingga meningkatkan cakupan wilayah pengawasan dan endurance meningkat;
2. Meminimalisasi pencapaian “upaya pemenuhan variabel target operasi” (khususnya bagi kapal Kelas 1) untuk meningkatkan efisiensi operasi dan cakupan wilayah pengawasan.

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 4 ini sebesar Rp189.658.206.000,- dan sampai dengan triwulan II 2023 telah terealisasi sebesar Rp72.300.918.833,- atau 38,12% dari total pagu.

SASARAN KEGIATAN 4

TERSELENGGARANYA PEMBANGUNAN SERTA PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN SDKP YANG SESUAI KETENTUAN

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana Pengawasan SDKP Kapal Pengawas Kelas II dan (2) Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP.

5-Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP

Indikator Kinerja “Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana Pengawasan SDKP Kapal Pengawas Kelas II” IKU ini bertujuan untuk mengukur persentase penyelesaian jumlah armada dan fasilitas pendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang akan dibangun di tahun berjalan.

Pada tahun 2023 terdapat Pengadaan sebanyak 2 (dua) unit Kapal Pengawas Perikanan kelas II yang dilakukan Multi Years Contract (MYC) Tahun anggaran 2022-2023. Untuk Progres Pembangunan Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan Kelas II (MYC) hingga tahun 2022 telah tercapai 10% dan sisa target pembangunan fisik tahun 2023 sebesar 90% target keseluruhan pada tahun 2023 sebesar 100%. Progress pembangunan merupakan persentase penyelesaian pembangunan konstruksi.

Rincian capaian IKU 5 Direktorat POA periode Tahun 2023 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 13. Rincian capaian IKU 5 Direktorat POA Triwulan II 2023

INDIKATOR KINERJA	TW II 2022			TW II 2023			RENSTRA 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana Pengawasan SDKP Kapal Pengawas Kelas II	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator “Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana Pengawasan SDKP Kapal Pengawas Kelas II” merupakan indikator baru pada tahun 2023 sehingga realisasi tidak dapat dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pencapaian IKU Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana Pengawasan SDKP Kapal Pengawas Kelas II pada Triwulan II belum dapat dihitung dikarenakan target capaian dihitung di akhir tahun. Untuk target Renstra 2020-2024 juga tidak ada.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk dapat mencapai target tersebut diatas, antara lain:

1. Melakukan rapat koordinasi/pengendalian rutin dengan PT. Palindo Marine selaku penyedia, PT. Zatria Awan Consultant sebagai konsultan pengawas, PT. Biro Klasifikasi Indonesia sebagai badan klasifikasi, Inspektorat Jenderal KKP, tim desain Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan pihak terkait lainnya untuk membahas progres dan kendala serta solusinya selama pelaksanaan pekerjaan;
2. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara langsung di lapangan (galangan) dengan didampingi tim desain BRIN, tim Itjen KKP, konsultan pengawas dan pihak terkait lainnya;
3. PPK memberikan surat instruksi yang diperlukan kepada penyedia dan konsultan pengawas;
4. Melakukan open management dengan melibatkan Kejaksaan RI, Bareskrim Polri, BPKP, Itjen KKP, LKPP dan pihak terkait lainnya.

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 5 ini sebesar Rp172.840.000.000,- dan sampai dengan triwulan II 2023 telah terealisasi sebesar Rp39.291.178.922,- atau 22,73% dari total pagu.

6-Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP

Indikator Kinerja “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP” IKU ini bertujuan untuk mengukur Jumlah armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang siap operasi pada tahun 2023.

Perawatan Sarana Pengawasan SDKP pada periode Triwulan II 2023 terdiri dari: perawatan pencegahan (preventive maintenance), perawatan prediktif (predictive maintenance), dan perawatan darurat (breakdown maintenance) dengan rincian sebagai berikut:

1. Perawatan Pencegahan (Preventive maintenance) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin setiap bulan, kegiatan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap resiko kerusakan dini (preventive maintenance) pada kapal. Perawatan rutin diharapkan dapat menjaga dan memelihara kondisi kapal pengawas agar selalu dalam keadaan siap operasi.
2. Perawatan Prediktif (Predictive maintenance) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara memprediksi kerusakan yang akan timbul pada kapal pengawas, kegiatan ini dilakukan sebagai langkah untuk perawatan kapal pengawas yang bersifat periode. Perawatan prediktif diharapkan dapat menjaga dan memelihara kondisi kapal pengawas agar selalu dalam keadaan siap operasi.
3. Perawatan Darurat (Breakdown maintenance) merupakan perawatan yang dilaksanakan dalam rangka menangani/memperbaiki kerusakan yang terjadi diatas kapal akibat kejadian yang tidak terduga (unpredicted), kegiatan perbaikan ini sangat penting untuk segera dilakukan agar tidak terjadi kerusakan lanjutan yang lebih fatal. Perbaikan darurat dapat dilaksanakan melalui pihak ketiga atau dengan cara swakelola sesuai batas kemampuan teknis yang dimiliki Awak Kapal Pengawas (AKP).

Tabel 14. Target dan Realisasi IKU 6 Periode Triwulan II 2023

INDIKATOR KINERJA	TW II 2022			TW II 2023			RENSTRA 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP	-	-	-	100%	100%	100	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian pada Triwulan II 2023 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 100 dengan persentase capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada Tahun sebelumnya, realisasi tidak dapat dibandingkan dikarenakan tahun sebelumnya IKU tersebut ditargetkan penyelesaian diakhir tahun. Direktorat POA senantiasa memenuhi target dari Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan agar seluruh Armada siap beroperasi untuk mengawasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di perairan Indonesia, hal ini dipengaruhi oleh monitoring kepada tiap UPT dengan mengharuskan melaporkan kondisi armada setiap bulannya agar kegiatan perawatan rutin dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang dibuat.

Selama periode triwulan II 2023 untuk mendukung keberhasilan capaian IKU Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP, telah dilaksanakan pemeliharaan dan perawatan 8unit kapal pengawas di satker Pusat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 15. Daftar kegiatan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas

NO	Kapal Pengawas	Jenis Perawatan			Tanggal Pelaksanaan
		Preventif	Prediktif	Darurat	
1	KP. Orca 01		Pengadaan Suku Cadang Insert Elemen Pre Fuel Filter		11-Apr-23
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Orca 01 (Type 60 Meter) Bulan April 2023			30 April 2023
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Orca 01 (Type 60 Meter) Bulan Mei 2023			
			Pengadaan Suku Cadang Auxiliary Engine Caterpillar		
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Orca 01 (Type 60 Meter) Bulan Juni 2023			

NO	Kapal Pengawas	Jenis Perawatan			Tanggal Pelaksanaan
		Preventif	Prediktif	Darurat	
2	KP. Orca 02		Pengadaan Suku Cadang Insert Elemen Pre Fuel Filter		11-Apr-23
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Orca 02 (Type 60 Meter) Bulan April 2023			30 April 2023
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Orca 01 (Type 60 Meter) Bulan Mei 2023			31 Mei 2023
				Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Pemasangan Blower Kapal Pengawas Orca 02	19 Juni 2023
				Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Pembersihan Tritip Kapal Pengawas Orca 02	19 Juni 2023
			Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Pemasangan Pompa Pendingin AC Kapal Pengawas Orca 02	19 Juni 2023	

NO	Kapal Pengawas	Jenis Perawatan			Tanggal Pelaksanaan
		Preventif	Prediktif	Darurat	
2	KP. Orca 02		Pengadaan Suku Cadang Auxiliary Engine Caterpillar		20 Juni 2023
			Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas Orca 02 Dalam Rangka Pengadaan Tangki BBM Sea Rider		21 Juni 2023
		Service Perlengkapan Komunikasi Kapal Pengawas Orca 02			22 Juni 2023
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Orca 01 (Type 60 Meter) Bulan Juni 2023			30 Juni 2023
		Pengadaan Suku Cadang Insert Elemen Pre Fuel Filter			11 April 2023
3	KP. Orca 03			Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Perawatan Saringan Utama Kapal Pengawas Orca 03	27 April 2023
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Orca 03 (Type 60 Meter) Bulan April 2023			30 April 2023

NO	Kapal Pengawas	Jenis Perawatan			Tanggal Pelaksanaan
		Preventif	Prediktif	Darurat	
3	KP. Orca 03	Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Orca 03 (Type 60 Meter) Bulan Mei 2023			31 Mei 2023
			Pengadaan Suku Cadang Auxiliary Engine Caterpillar		20 Juni 2023
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Orca 03 (Type 60 Meter) Bulan Juni 2023			30 Juni 2023
4	KP Orca 04		Pengadaan Suku Cadang Insert Elemen Pre Fuel Filter		11-Apr-23
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Orca 04 (Type 60 Meter) Bulan April 2023			30 April 2023
		Service Perlengkapan Keselamatan Lifteraft Kapal Pengawas Orca 04			10 Mei 2023
		Service Perlengkapan Keselamatan PMK Kapal Pengawas Orca 04			10 Mei 2023

NO	Kapal Pengawas	Jenis Perawatan			Tanggal Pelaksanaan
		Preventif	Prediktif	Darurat	
4	KP Orca 04			Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Service Exhaust Manifold ME Kapal Pengawas Orca 04	20 Mei 2023
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Orca 04 (Type 60 Meter) Bulan Mei 2023			31 Mei 2023
			Pengadaan Suku Cadang Auxiliary Engine Caterpillar		20 Juni 2023
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Orca 04 (Type 60 Meter) Bulan Juni 2023			30 Juni 2023
5	KP. HMT 01		Pengadaan Suku Cadang Insert Elemen Pre Fuel Filter		11-Apr-23
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas HMT 01 (Type 42 Meter) Bulan April 2023			30 April 2023

NO	Kapal Pengawas	Jenis Perawatan			Tanggal Pelaksanaan
		Preventif	Prediktif	Darurat	
5	KP. HMT 01	Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas HMT 01 (Type 42 Meter) Bulan Mei 2023			31 Mei 2023
				Perawatan Darurat Kapal Pengawas 42 Meter Dalam Rangka Perbaikan Alternator Main Engine Kiri Kanan Kapal Pengawas Hiu Macan Tutul 01	6 Juni 2023
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas HMT 01 (Type 42 Meter) Bulan Juni 2023			30 Juni 2023
6	KP. HMT 02		Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas 42 Meter Dalam Rangka Pengadaan dan Pemasangan AC Split Kapal Pengawas Hiu Macan Tutul 02		10 April 2023

NO	Kapal Pengawas	Jenis Perawatan			Tanggal Pelaksanaan
		Preventif	Prediktif	Darurat	
6	KP. HMT 02	Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas HMT 01 (Type 42 Meter) Bulan April 2023			30 April 2023
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas HMT 01 (Type 42 Meter) Bulan Mei 2023			31 Mei 2023
			Pengadaan Suku Cadang Mesin Induk Caterpillar		20 Juni 2023
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas HMT 01 (Type 42 Meter) Bulan Juni 2023			30 Juni 2023
7	KP. Paus 01		Pengadaan Suku Cadang Mesin Induk Guascor		05-Apr-23
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas HMT 01 (Type 42 Meter) Bulan April 2023			30-Apr-23

NO	Kapal Pengawas	Jenis Perawatan			Tanggal Pelaksanaan
		Preventif	Prediktif	Darurat	
7	KP. Paus 01	Service Perlengkapan Keselamatan Liferaft & PMK Kapal Pengawas Paus 01			10 Mei 2023
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas HMT 01 (Type 42 Meter) Bulan Mei 2023			31 Mei 2023
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas HMT 01 (Type 42 Meter) Bulan Juni 2023			30 Juni 2023
8	KP. Akar Bahar 01			Perawatan Darurat Kapal Pengawas 14 Meter Dalam Rangka Penggantian Evaporator Air Conditioner (AC) Kapal Pengawas Akar Bahar 01	17 April 2023
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas HMT 01 (Type 42 Meter) Bulan April 2023			30-Apr-23

NO	Kapal Pengawas	Jenis Perawatan			Tanggal Pelaksanaan
		Preventif	Prediktif	Darurat	
8	KP. Akar Bahar 01	Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas HMT 01 (Type 42 Meter) Bulan Mei 2023			31 Mei 2023
		Fumigasi Kapal Pengawas Akar Bahar 01			13 Juni 2023
			Pengadaan Suku Cadang Mesin Induk Yanmar		20 Juni 2023
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas HMT 01 (Type 42 Meter) Bulan Juni 2023			30 Juni 2023

Keberhasilan dalam mencapai target tersebut tidak lepas dari beberapa hal yang dilakukan oleh Direktorat POA diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menyusun repair list masing-masing Kapal Pengawas secara rinci;
- 2) Senantiasa melakukan rapat konsultasi dengan APIP terkait pekerjaan tersebut;
- 3) Menyusun dokumen manajemen resiko kegiatan perawatan;
- 4) Senantiasa melakukan rapat evaluasi kepada pihak galangan atau pelaksana pekerjaan untuk mengetahui progress pekerjaan;
- 5) Menurunkan tim supervisi kegiatan perawatan secara berkala dan bergantian untuk mempermudah koordinasi dan memperoleh data faktual detail pekerjaan dilapangan.

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 6 ini sebesar Rp 31.273.330.000,- dan sampai dengan Triwulan II 2023 telah terealisasi sebesar Rp 7.574.865.082,- atau 24,22% dari total pagu.

SASARAN KEGIATAN 5

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK LINGKUP DITJEN PSDKP

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 diukur dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), (2) Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA, (3) Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Resiko lingkup Direktorat POA, (4) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA, (5) Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA, (6) Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat POA, (7) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan, (8) Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat POA, (9) Nilai Implementasi Program Budaya Kerja, (10) Jumlah Inovasi yang dihasilkan, (11) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA, (12) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA, (13) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA.

7-Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)

Layanan penerbitan dokumen tertulis yang menyatakan bahwa transmitter SPKP pada kapal perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan dan dapat dipantau pada pusat pemantauan kapal perikanan;

2. Pemberian Akses Pemantauan Kapal Perikanan

Dengan adanya inovasi pengajuan secara mandiri, secara otomatis Pengguna akan mendapatkan akses untuk mengajukan layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan sekaligus untuk memantau kapal perikanan.

3. Analisis Pergerakan Kapal Perikanan,

Bagi perusahaan perikanan yang memiliki keperluan khusus dalam melakukan tracking kapal perikanan dapat mengetahui posisi pergerakan kapal perikanan yang dimiliki dengan cara mengajukan permohonan pelayanan analisis kapal perikanan kepada Direktur Jenderal PSDKP.

Tabel 16. Target dan Realisasi IKU 7 Periode Triwulan II 2023

INDIKATOR KINERJA	TW II 2022			TW II 2023			RENSTRA 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP	80	92.01	115.01	80	89.67	112	80	89.67	112

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian pada Triwulan II 2023 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 89,67 dengan persentase capaian sebesar 112%. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 terdapat perbedaan unsur penilaian IKM sebelumnya dengan yang digunakan pada triwulan II tahun 2023 oleh sebab itu hasil penilaian sebelumnya tidak dapat dibandingkan dengan hasil di triwulan II tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 yaitu sebesar 80 persen realisasi ini telah mencapai 112 persen, dengan demikian target sesungguhnya telah tercapai, hanya saja perlu upaya mempertahankan capaian tersebut sampai akhir periode Renstra.

Tabel 17. Hasil survey kepuasan masyarakat

Produk Layanan	Nilai Kepuasan Triwulan II 2023
Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)	90,07
Analisis Pergerakan Kapal Perikanan	88,27
Pemberian Akses Pemantauan Kapal Perikanan	90,33
Total	268,67
Rata-rata	89,67

Selama periode triwulan II 2023 untuk mendukung keberhasilan capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelatihan Pemahaman dan Bimbingan Teknis Perancangan & Pengembangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 (Bandung, 11-14 April 2023);
2. Knowledge Sharing Kesantunan Komunikasi dalam Berbahasa Isyarat untuk Petugas Pelayanan Publik (Jakarta, 15 Mei 2023);
3. Eksternal Audit Stage II ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu di lingkup Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) (Jakarta, 8 Juni 2023);
4. Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan II Tahun 2023 (Cirebon, 15 Juni 2023).

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 7 ini sebesar Rp2.750.000.000,- dan sampai dengan triwulan II 2023 telah terealisasi sebesar Rp1.342.586.788,- atau 48,82% dari total pagu.

8-Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pengawasan SDKP Lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

Jumlah rancangan kebijakan pemerintah di bidang Pengawasan SDKP yang disusun lingkup Direktorat POA Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II 2023 progress masih dalam tahap penyusunan draft dan proses pengesahan. Direncanakan pengukuran dilakukan pada periode Triwulan IV 2023.

Dengan adanya IKU ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting bagi Direktorat POA untuk menegakkan peraturan terhadap pelanggar yang pada akhirnya menjadi pemicu dalam meningkatnya kinerja pengawasan.

Tabel 18. Hasil capaian kinerja IKU 8 periode triwulan II 2023

INDIKATOR KINERJA	TW II 2022			TW II 2023			RENSTRA 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pengawasan SDKP Lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian pada Triwulan II 2023 belum ada capaian dikarenakan dilakukan pada akhir tahun 2023. Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada Tahun 2022, tidak dapat dibandingkan dikarenakan tahun sebelumnya IKU tersebut diatas ditargetkan pada akhir tahun. Untuk target Renstra 2020-2024 juga tidak ada.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal penyelesaian NSPK di bidang Pemantauan dan Operasi Armada;
2. Penetapan target NSPK yang menjadi prioritas oleh Direktur POA yang harus diselesaikan.

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 8 ini sebesar Rp225.000.000,- dan sampai dengan triwulan II 2023 belum ada realisasi.

9-Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

- Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.
- Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

- Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Tabel 19. Target dan Realisasi IKU 9 Periode Triwulan II 2023

INDIKATOR KINERJA	TW II 2022			TW II 2023			RENSTRA 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Resiko lingkup Direktorat POA	-	-	-	100%	100%	100	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian pada Triwulan II 2023 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 100 dengan persentase capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada Tahun 2022, tidak dapat dibandingkan dikarenakan IKU tersebut merupakan IKU baru di Tahun 2023. Untuk target Renstra 2020-2024 juga tidak ada.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Resiko lingkup Direktorat POA;
2. Pemantauan Pengendalian Manajemen Resiko yang menjadi prioritas oleh Direktur POA yang harus diselesaikan.

10-Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

Profesional ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Kualifikasi [Bobot 25%] yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan penilaian sebagai berikut:

- Pendidikan: S3 (Nilai 25); S2 (Nilai 20); S1 (Nilai 15); D3 (Nilai 10); DII/DI/SMA (Nilai 5); SMP/SD (Nilai 1)
- Kompetensi [Bobot 40%] yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), dengan penilaian sebagai berikut:

Pejabat Struktural:

DIKLAT PIM: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)

DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)

SEMINAR: Pernah ikut (Nilai10), tidak pernah (nilai0)

Pejabat Fungsional Tertentu:

DIKLAT Teknis/Fungsional: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)

DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)

SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)

Pejabat Fungsional Umum/ Staf:

DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 22,5), tidak pernah (nilai 0)

•	ASN Struktural : (Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatpim+Diklat20oj+Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)
•	ASN Fungsional : (Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatfungsional+Diklat20oj+ Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)
•	ASN Staff: (Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklat20oj+ Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)

Tabel 20. Target dan Realisasi IKU-10 Periode Triwulan II 2023

INDIKATOR KINERJA	TW II 2022			TW II 2023			RENSTRA 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat POA	-	-	-	Indeks 71	Indeks 80.94	114	Indeks 76	Indeks 80.94	107

Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat POA” ditargetkan sebesar 71. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan II 2023 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 80,94 dengan persentase capaian sebesar 114%. Apabila dibandingkan dengan capaian di periode yang sama tidak dapat dilakukan dikarenakan capaian tahun sebelumnya dilakukan pengukuran di akhir tahun. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 yaitu sebesar 76 persen melampaui dari target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 107%.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal pemenuhan nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat POA;
- Pemenuhan IP ASN yang menjadi prioritas oleh Direktur POA yang harus diselesaikan.

11-Tingkat Pemahaman Peserta BIMTEK Lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

IKU ini digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman Peserta BIMTEK yang dilaksanakan oleh Direktorat POA. Nilai Tingkat Pemahaman dari Peserta BIMTEK diperoleh dari Ujian/Test yang dilakukan sesudah materi BIMTEK diberikan (Post Test). Direktorat POA telah melaksanakan Sosialisasi dan BIMTEK Aplikasi SPKP Tahun 2023 pada Bulan Maret 2023 di Manado dengan peserta sebanyak 46 orang pengguna Layanan SPKP.

Tabel 21.Target dan Realisasi IKU-11 Periode Triwulan II 2023

INDIKATOR KINERJA	TW II 2022			TW II 2023			RENSTRA 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek Lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	80	-	-

Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU “Tingkat Pemahaman Peserta BIMTEK Lingkup Direktorat POA” belum ada capaian dikarenakan IKU tersebut akan dilakukan perhitungan di akhir tahun 2023, bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan dikarenakan belum dilakukan pengukuran. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 belum bisa dibandingkan.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal pelaksanaan Bimtek SPKP di bidang Operasi Pusat Pengendalian;
- Perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang menjadi prioritas untuk pemahaman para pemilik Kapal Perikanan dalam penggunaan Aplikasi Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

12-Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

Indikator nilai rekonsiliasi ini merupakan penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Manajemen Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP. Nilai rekonsiliasi adalah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan informasi.

Rekonsiliasi Kinerja merupakan bentuk verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkalit pelaporan kinerja.

Tabel 22. Target dan realisasi IKU 12 periode Triwulan II 2023

INDIKATOR KINERJA	TW II 2022			TW II 2023			RENSTRA 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU “Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Direktorat POA” ditargetkan sebesar 90. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan II 2023 belum ada realisasi dikarenakan pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2023. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 juga tidak ada.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal capaian nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada;
- Melakukan penilaian mandiri pada Lembar Kerja Evaluasi, dan memenuhi data dukung yang sudah ditetapkan.

13-Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK DJPSDKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 23. Target dan realisasi IKU 13 periode Triwulan II 2023

INDIKATOR KINERJA	TW II 2022			TW II 2023			RENSTRA 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat POA Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan	70%	70%	100	75	100	133	80	100	125

Berdasarkan tabel diatas, Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat POA yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” bila dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2022 realisasi capaian mengalami peningkatan sebesar 30%, dari target yang ditetapkan, hal ini dipengaruhi oleh penyelesaian dari target yang bertambah tiap tahunnya dan jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang harus ditindak lanjuti untuk perbaikan kinerja.

Namun demikian pada tahun 2023 capaian tetap melampaui dari target yang ditetapkan, sehingga periode Triwulan II 2023 sebesar 75 dengan realisasi 133%. Untuk mencapai keberhasilan IKU ini dipengaruhi oleh arahan dari pimpinan untuk segera melakukan tindak lanjut dari rekomendasi yang ada. Bila dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024, realisasi telah melampau dari target yang ditetapkan. Dari capaian tersebut mengindikasikan bahwa Direktorat POA senantiasa memenuhi target dari Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat POA yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan untuk memastikan tidak terdapat temuan yang harus dilakukan proses tindak lanjut berdasarkan laporan perhitungan hasil temuan Inspektorat Jenderal.

Tabel 24. Rekapitulasi Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Triwulan II 2023

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	37	35	94,59	2	5,41
2	Direktorat POA	1	1	100	0	0
3	Direktorat PPSDK	0	0	0	0	0
4	Direktorat PPSDP	0	0	-	0	0
6	Direktorat PP	0	0	-	0	0

14-Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat POA

IKU ini digunakan untuk mengukur sejauh mana realisasi anggaran yang telah dilaksanakan oleh Direktorat POA.

1. Indikator nilai rekonsiliasi ini merupakan penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Manajemen Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP. Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran digunakan untuk mengukur kinerja penyerapan anggaran lingkup Direktorat POA tahun 2023.
2. Dalam rangka mencapai target realisasi anggaran, dilaksanakan aktivitas Pengendalian berupa:
 - Memastikan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan sesuai dengan Kaidah;
 - Memastikan Penyelesaian Kegiatan Kontraktual sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - Memastikan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Akuntabel, dan
 - Meminimalisir Deviasi halaman III DIPA.

Tabel 25. Target dan realisasi IKU 14 periode Triwulan II 2023

INDIKATOR KINERJA	TW II 2022			TW II 2023			RENSTRA 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2023. Capaian IKU “Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat POA” ditargetkan sebesar 99,4 pada akhir tahun 2023. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan II 2023 belum ada realisasi dikarenakan pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2023. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 juga tidak ada.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal capaian Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada;
- Melakukan penilaian mandiri, dan memenuhi data dukung yang sudah ditetapkan.

15-Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

Indikator ini merupakan IKU baru di Tahun 2022, Nilai Implementasi Program Budaya Kerja tingkat Ditjen PSDKP diperoleh dari:

- Rata-rata nilai LKE pelaksanaan Budaya Kerja Seluruh Satker Pusat (5 Satker) dan Satker UPT (14 Satker)
- Nilai LKE yang digunakan adalah nilai tanpa dikonversi ke persentase
- Target nilai Satker Pusat minimal 23 per triwulan
- Target nilai Satker UPT minimal 20,5 per triwulan

Tabel 26. Rincian target dan realisasi IKU-15 periode Triwulan II 2023

INDIKATOR KINERJA	TW II 2022			TW II 2023			RENSTRA 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” ditargetkan sebesar 21 pada akhir tahun 2023. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan II 2023 belum ada realisasi dikarenakan pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2023. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 juga tidak ada.

Pada Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada sesudah adanya penerapan program budaya kerja telah terjadi perubahan pola pikir dan cara kerja melalui budaya kerja yang diarahkan untuk menghasilkan inovasi pada setiap area perubahan, karena terdapat lingkungan strategis yang berubah menghasilkan terobosan dalam melakukan kegiatan. Langkah implementasi 11 (sebelas) program budaya kerja pada Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada yang mendukung dalam pencapaian IKU Implementasi Budaya Kerja adalah:

- Hasilkan Inovasi Satker (HIU);
Target Inovasi per Satker telah tercantum pada indikator kinerja utama.
- Lima Menit Sebelum Jadwal Rapat;
Rapat biasanya dimulai dengan peserta yang sedikit dan banyak terlambat, dengan adanya program ini maka rapat pada Dit. POA dimulai dengan sebagian peserta sudah hadir, sehingga arahan dan substansi awal dapat dipahami

- Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5R);

Ruangan kerja sebelumnya terkesan berantakan dan tidak teratur, maka dengan adanya program masing-masing meja tiap pegawai telah menjalankan program 5R.

- Upayakan Data Terkini (UPDATE);

Pada saat rapat pimpinan terdapat unit kerja yang menyampaikan paparan dengan menggunakan data pengawasan atau data penangkapan kapal ilegal yang periode lampau, maka dengan adanya program ini tiap pegawai telah melakukan usaha terkini untuk mendapatkan data yang UPDATE.

- Organisasikan Rapat, Catat, Aksi, dan Arsipkan (ORCA);

Pada saat kegiatan temu teknis aparat penegak hukum terdapat agenda yang belum rapi terjadwal, notulen dan pendokumentasian yang masih berantakan, dengan adanya program ORCA kegiatan menjadi lebih komprehensif.

- Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (TAAT);

Dalam pelaksanaan tugas adanya potensi untuk melakukan korupsi, menerima suap, menerima gratifikasi dan mengambil kebijakan yang bertentangan dengan hukum, maka dengan adanya program TAAT ini telah mewujudkan pegawai yang berintegritas tinggi dalam melaksanakan tugas sehingga menjaga nama baik organisasi dan kepercayaan publik.

- Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel, dan Amanah (BARRAKUDA);

Pada saat penyusunan anggaran terdapat kesan dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan tidak sesuai ketentuan, maka dengan adanya program BARRAKUDA ini tiap pegawai telah merencanakan anggaran sesuai kaidah perencanaan dan penganggaran sehingga terjadi peningkatan kualitas DIPA dan meminimalisir temuan auditor.

- ASN PSDKP Produktif Kerja (APIK);

Pada saat jam kerja terdapat pegawai yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak fokus, maka dengan adanya program APIK ini setiap pegawai telah bertanggungjawab dan mempunyai akuntabilitas terhadap pekerjaannya dengan meminimalisir hal-hal yang dapat mengganggu fokus kerjanya.

- Menyelesaikan Tugas Dengan Tepat (MANTAP);

Terdapat penyelesaian tugas oleh pegawai atau suatu unit kerja yang terlambat dan tidak tepat waktu, serta mempengaruhi kinerja unit kerja lain, maka dengan adanya program MANTAP ini maka telah tumbuh komitmen kesadaran untuk menghasilkan pekerjaan dengan kualitas tinggi dan diselesaikan secara tepat waktu.

- Harga, Motivasi, dan Inisiatif (HARMONIS);

Kurangnya kesadaran dalam memberi penghargaan dan apresiasi mengakibatkan motivasi dan hubungan sesama pegawai menjadi kurang optimal, maka dengan adanya program HARMONIS ini telah mendorong sikap saling menghargai dan apresiasi terhadap kontribusi kerja pegawai sekecil dan sesederhana apapun dalam pelaksanaan tugas. Terdapat apresiasi Sobat PILAR PSDKP bulanan dan tahunan.

- Gelorakan Gerakan Hemat Energi (Go Green).

Lingkungan kerja terdapat penggunaan energi yang boros, penggunaan kertas kerja yang banyak, penggunaan air minum dalam kemasan, maka dengan adanya program Go Green maka tiap pegawai telah timbul kesadaran untuk melakukan efisiensi dalam hal menghemat penggunaan air dan listrik, mematikan peralatan kerja sebelum pulang, dan mengurangi penggunaan kertas dan tinta dalam memproses dokumen kerja.

16-Jumlah Inovasi Yang Dihasilkan

Indikator ini merupakan inovasi pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat untuk mendukung program peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.7/2021, Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Tabel 27. Target dan realisasi IKU-16 periode Triwulan II 2023

INDIKATOR KINERJA	TW II 2022			TW II 2023			RENSTRA 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Jumlah Inovasi yang dihasilkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, IKU tersebut dilakukan perubahan nama pada tahun 2023 yang sebelumnya “Unit yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik”. Capaian IKU “Jumlah Inovasi yang dihasilkan” ditargetkan sebesar 1 pada akhir tahun 2023. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan II 2023 belum ada realisasi dikarenakan pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2023. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 juga tidak ada.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam ide/gagasan baru untuk selalu membuat inovasi tahunan agar kinerja menjadi lebih baik dari sebelumnya;
- Melakukan rapat internal untuk pelaksanaan pembuatan inovasi perubahan setiap tahunnya.

17-Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

Indikator “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar” merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur persentase unit kerja dalam menerapkan aplikasi manajemen pengetahuan (<https://kinerjakp.bitrix24.com>).

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

- Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;
- Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang per Unit Eselon IV);
- Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf.

Tabel 28. Target dan realisasi IKU 17 periode Triwulan II 2023

INDIKATOR KINERJA	TW II 2022			TW II 2023			RENSTRA 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar Lingkup Direktorat POA	86%	99.31%	115.48	92%	100%	109	90%	100%	111.11

Berdasarkan tabel diatas, capaian periode Triwulan II 2023 sebesar 100 dengan realisasi 109%. Bila dibandingkan dengan Triwulan II 2022 capaian realisasi mengalami kenaikan dari capaian sebelumnya 99,31 dikarenakan untuk mencapai keberhasilan IKU ini dipengaruhi oleh keaktifan dan keikutsertaan seluruh pegawai untuk upload dokumen sesuai arahan pimpinan setiap waktu. Bila dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024, realisasi telah melampaui target yang ditetapkan.

Adapun perbandingan dari nilai capaian IKU tersebut antar Eselon 2 lingkup Ditjen PSDKP ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 29. Tabel Capaian Nilai IKU MP Ditjen PSDKP Triwulan II 2023

No	Unit Kerja	TW II	Nilai Akhir
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	98,06%	98,06%
2	Direktorat POA	100%	100%
3	Direktorat PPSDP	95%	95%
4	Direktorat PPSDK	100%	100%
5	Direktorat PP	99,17%	99,17%

18-Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV.

Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022;
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
- Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017- 2019;
- Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
- Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Tabel 30. Target dan realisasi IKU 18 periode Triwulan II 2023

INDIKATOR KINERJA	TW II 2022			TW II 2023			RENSTRA 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA” ditargetkan sebesar 77,5 pada akhir tahun 2023. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan II 2023 belum ada realisasi dikarenakan pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2023. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 juga tidak ada.

19-Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV.

Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
- Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
- Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%);
- Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Tabel 31. Target dan realisasi IKU-19 periode Triwulan II 2023

INDIKATOR KINERJA	TW II 2022			TW II 2023			RENSTRA 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA” ditargetkan sebesar 77,5 pada akhir tahun 2023. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan II 2023 belum ada realisasi dikarenakan pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2023. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 juga tidak ada.

A. Realisasi Anggaran

Di bidang anggaran, Direktorat POA sampai dengan Tahun 2023 telah melaksanakan 9 Rincian Output (RO) Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan dalam DIPA Satker Direktorat POA, Ditjen PSDKP tahun 2023. Pagu Direktorat POA sebesar Rp444.055.581.000 (empat ratus empat puluh empat miliar lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Realisasi anggaran Direktorat POA Triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar Rp 145,120,428,422 atau 32,68% dari pagu Rp444.055.581.000. Realisasi anggaran tersebut bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 lebih rendah, realisasi Triwulan II 2022 sebesar Rp. 175,836,878,956 hal ini dipengaruhi adanya Save Automatic Adjustment, namun kinerja penyerapan anggaran tersebut tetap dimaksimalkan sebagai bentuk perbaikan tata Kelola pelaksanaan anggaran dengan percepatan pengadaan Barang dan Jasa serta pelaksanaan kegiatan lebih awal di Tahun 2023.

Tabel 32. Rekap Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA Triwulan II Tahun 2023

Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi	Sisa Anggaran (Rp)	% Sisa
Layanan penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)	2.750.000.000	1.342.586.788	48,82%	1.407.413.212	51,18%
NSPK Pemantauan dan Operasi Armada	225.000.000	-	-	225.000.000	100%
Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan SDKP yang dipantau	500.000.000	231.753.410	46,35%	268.246.590	53,65%
Operasional Pembinaan POKMASWAS yang di pantau	140.000.000	62.541.000	44,67%	77.459.000	55,33%
Operasi Kapal Pengawas	189.658.206.000	72.300.918.833	38,12%	117.357.287.167	61,88%
Operasi Pesawat Patroli	41.250.000.000	22.703.177.032	55,04%	18.546.822.968	44,96%
Kapal Pengawas	172.840.000.000	39.291.178.922	22,73%	133.548.821.078	77,27%
Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	31.273.330.000	7.574.865.082	24,22%	23.698.464.918	75,78%
Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi	5.419.045.000	1.613.407.355	29,77%	3.805.637.645	70,23%
TOTAL	444.055.581.000	145.120.428.422	32,68%	298.935.152.578	67,32%

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dengan memaksimalkan sumber anggaran yang ada untuk mendukung kinerja organisasi. Optimalisasi yang telah dilakukan pada Triwulan II 2023 telah memaksimalkan kinerja operasi melalui matra udara (airborne surveillance) yang diintegrasikan dengan armada kapal pengawas. Pesawat patroli udara melakukan pemantauan target kapal-kapal dan wilayah konservasi perairan, selanjutnya data valid yang memuat identitas kapal, foto kapal dan posisi kapal dikirimkan ke pusat komando operasi dan armada kapal pengawas. Pola ini dikenal dengan istilah intercept. Pola intercept ini sangat menghemat Bahan Bakar Minyak, karena Kapal Pengawas Perikanan telah memiliki target operasi yang jelas karena sudah divalidasi oleh pesawat patroli udara.

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

1. Nilai capaian kinerja rata-rata Direktorat POA periode Triwulan II 2023 sebesar 111,35%.
2. Jumlah Indikator Kinerja Direktorat POA tahun 2023 sebanyak 19 (sembilan belas) indikator kinerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 (sepuluh) indikator kinerja diukur pada triwulan II 2023 yang seluruhnya tercapai sesuai target bahkan melampaui, adapun 9 (sembilan) indikator yang lain, diukur pada periode berikutnya.

B. Rekomendasi

Secara umum berdasarkan data-data yang disajikan pada Laporan Kinerja Direktorat POA periode triwulan II 2023 ini tidak ada kendala berarti, hanya saja perlu dilakukan beberapa hal untuk memastikan capaian di akhir tahun dapat maksimal, yakni sebagai berikut:

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
Memastikan setiap indikator kinerja tercapai sesuai target yang ditetapkan.	Melakukan rapat evaluasi bulanan serta melakukan Monev baik online maupun offline kepada pihak-pihak yang memiliki kontribusi terhadap capaian kinerja Direktorat POA.
Sehubungan dengan masih tingginya harga BBM Kapal Pengawas, agar kelompok terkait membuat analisis ketersediaan BBM Kapal Pengawas dihubungkan dengan kemampuan mencapai target yang ditetapkan.	Direktur POA membuat surat penyampaian analisis ketersediaan BBM Kapal Pengawas ditujukan kepada Direktur Jenderal PSDKP.
Melakukan upaya maksimal untuk memastikan tercapainya seluruh target Renstra Diten PSDKP 2020-2024.	Melakukan rapat evaluasi triwulanan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam pemenuhan target Renstra PSDKP 2020-2024.